

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengadaan Proyek

Pengertian umum dan sejarah pemadam kebakaran di Indonesia:

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, gedung, hutan, dsb), secara sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan kerugian secara ekonomi, sosial dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Perkembangan penyelenggaraan bangunan di perkotaan dewasa ini baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan prasarana dan sarananya semakin kompleks. Dalam penyelenggaraan bangunan tersebut, keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama, khususnya terhadap bahaya kebakaran agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. Untuk itu pemadam kebakaran merupakan suatu unsur penting dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Dalam sejarahnya, pemadam kebakaran belum dikenal di Indonesia hingga awal abad 20 (dua puluh), Indonesia yang masih menjadi bagian Hindia Belanda belum memiliki korps pemadam kebakaran yang profesional. Korps pemadam kebakaran yang paling awal tercatat di Indonesia adalah di Batavia, terdiri dari sekelompok kecil masyarakat yang dibentuk pemerintah Batavia untuk memadamkan api dengan cara yang sederhana, karena pada saat itu bahaya kebakaran dinilai belum membahayakan kehidupan masyarakat. Namun pada saat terjadi kebakaran besar di Batavia, sistem yang sederhana tersebut tidak mampu memadamkan kebaran besar sehingga merubah persepsi masyarakat dan pemerintah Batavia untuk memiliki suatu kesatuan khusus yang mampu mengatasi kebakaran dengan skala besar. Dalam perkembangannya, korps pemadam kebakaran yang pada awalnya hanya berada di Batavia, mulai didirikan di

berbagai daerah di Indonesia/Hindia Belanda, salah satunya adalah kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta.

Kondisi umum pemadam kebakaran di Kulon Progo:

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan produktivitas yang masih rendah, Kabupaten Kulon Progo mulai meningkatkan investasi di wilayahnya dengan perencanaan pembangunan proyek-proyek strategis. Diantara rencana investasi strategis Kabupaten Kulon Progo adalah proyek pembangunan bandara internasional, proyek pembangunan pelabuhan perikanan, proyek pertambangan pasir besi, dan proyek pembangunan kawasan industri besar, menengah, dan kecil. Implikasi ekonomi dari proyek-proyek tersebut adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga akan memajukan pembangunan fisik di Kabupaten Kulon Progo (misal, perumahan, pertokoan, dan pusat bisnis). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan juga dengan adanya proyeksi pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengharuskan pemerintah kabupaten mengupayakan peningkatan pelayanan publik, salah satunya adalah fasilitas pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan suatu wilayah berimplikasi pada meningkatnya potensi kebencanaan terutama kebakaran.

Untuk pelayanan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Kabupaten Kulon Progo memiliki bangunan pemadam kebakaran dengan luasan yang tidak sesuai standar dan kendaraan pemadam yang belum memadai. Jika mengacu pada PERMENPU No. 20 Th. 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan, fasilitas yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo hanya setara dengan bangunan pos pemadam kebakaran. Sedangkan idealnya bagi lingkup kabupaten, model bangunan pemadam kebakaran berupa bangunan wilayah pemadam kebakaran. Sehingga pengadaan Kantor Dinas Pemadam

Kebakaran bagi wilayah Kabupaten Kulon Progo menjadi kebutuhan yang penting.

Ketentuan pemerintah terkait pemadam kebakaran di Indonesia:

Dalam mengantisipasi dan mengatasi resiko kebakaran, lingkup perkotaan diatur dalam sebuah wilayah manajemen kebakaran (WMK), dimana WMK ini ditujukan untuk mengupayakan kesiapan instansi pemadam kebakaran terhadap kegiatan pemadaman kebakaran yang terjadi pada bangunan dan/atau lingkungan di dalam kota.

Untuk mengatur standar-standar tersebut pemerintah dalam PERMENPU No. 20 Th. 2009 telah membuat ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan. Dalam peraturan itu dijelaskan hirarki organisasi pemadam kebakaran kota/kabupaten, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari: pos pemadam kebakaran, sektor pemadam kebakaran, dan yang tertinggi (tingkat kabupaten/kota) adalah wilayah pemadam kebakaran. Selain itu dijelaskan pula standar-standar perencanaan dan perancangan bangunan (kantor) pemadam kebakaran dari setiap hirarki yang ada.

Fasilitas Pelatihan Pemadam Kebakaran:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dinas pemadam kebakaran bertanggung jawab memberikan upaya terbaiknya dalam mempersiapkan anggotanya dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Persiapan aparatur pemadam tersebut juga tertuang dalam PERMENPU No. 25 Th. 2008, bahwa program pengadaan prasarana rencana induk sistem proteksi kebakaran (RSPK) sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan stasiun/pos kebakaran (termasuk tempat latihan), bangunan penampungan air, asrama dan bengkel. Tempat latihan yang dimaksud adalah tempat latihan pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar yang ada. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan bagi aparaturnya pemadam kebakaran.

1.1.2 Latar Belakang Permasalahan Proyek

Sebagai bagian dari bangunan-bangunan milik pemerintah, bangunan Pemadam Kebakaran juga harus mampu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya terkait dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam upaya pemerintah mewujudkan *good governance* maka komitmen ini harus dapat tersampaikan kepada masyarakat, sehingga nantinya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini akan semakin tinggi. Kesadaran masyarakat ini adalah hal yang sangat penting, bukan hanya bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, namun juga bagi masyarakat umum bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, aparaturnya (petugas) pemadam kebakaran memiliki semangat yang tertuang dalam motto pemadam kebakaran yaitu “Pantang Pulang Sebelum Padam”. Adanya semangat tersebut menunjukkan dedikasi para petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tanggung jawabnya. Merujuk pada KBBI, pengertian dari dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia; pengabdian. Dengan kata lain dedikasi adalah pengabdian pada suatu tujuan tertentu. Sebagai bagian dari BPBD Kulon Progo, Damkar memiliki tujuan yang sama dengan BPBD. Tujuan BPBD tertuang dalam visinya yaitu “Terwujudnya Ketangguhan Kulon Progo Dalam Menghadapi Bencana”. Secara spesifik, merujuk pada visi BPBD Kulon Progo, Damkar Kulon Progo memiliki tujuan untuk mewujudkan ketangguhan Kulon Progo dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Seiring perkembangan kebutuhan penduduk Kulon Progo, maka wilayah Kulon Progo juga mengalami perkembangan baik itu berupa

bangunan maupun sarana dan prasarana. Menyesuaikan kondisi tersebut, maka Pemadam Kebakaran Kulon Progo diharapkan mampu memodernisasi dirinya sehingga ketangguhan Kulon Progo dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran semakin meningkat.

Ketangguhan dan modernitas menjadi sebuah kata kunci dalam penekanan citra/karakter yang diharapkan dimiliki oleh gedung Pemadam Kebakaran.

1.2 Rumusan Permasalahan

Bagaimana wujud rancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kulon Progo yang menunjukkan karakter tangguh dan modern melalui pengolahan tampilan bangunan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Terwujudnya rancangan Kantor Dinas Pelatihan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang menunjukkan karakter tangguh dan modern melalui pengolahan tampilan bangunan.

1.3.2 Sasaran

- a. Terwujudnya rancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan standar fungsi yang terdapat pada PERMENPU No.20 Th.2009.
- b. Terwujudnya rancangan Kantor Dinas dan Fasilitas Pelatihan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo dengan pengolahan tampilan bangunan yang mampu menunjukkan karakter tangguh dan modern.

1.4 Lingkup Studi

1.4.1 Lingkup Spasial

Bagian-bagian dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang akan diolah sebagai penekanan studi adalah:

- a. Penyesuaian standar bangunan WMK untuk Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo.
- b. Aspek tampilan bangunan dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo.

1.4.2 Lingkup Substansial

Perencanaan dan Perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo dengan penekanan pada karakter bangunan yang tangguh dan moderen.

1.4.3 Lingkup Temporal

Sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ada saat ini dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo saat ini, maka agar tetap sinkron dengan kondisi dan kebutuhan aktual, lingkup temporal ditentukan sampai 2035.

1.5 Metoda Pembahasan

Metoda yang akan dipakai dalam penyusunan landasan Konseptual perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo dengan pendekatan antara lain :

- a. Observasi Lapangan :
Cara ini dilakukan dengan mengunjungi pos pemadam kebakaran di Wates kemudian melakukan wawancara (sharing) dengan aparatur pemadam kebakaran dan mendokumentasikan hasilnya melalui foto dan catatan-catatan.
- b. Studi literatur :
Melakukan studi terhadap media informasi berupa buku, artikel, maupun internet mengenai informasi yang dibutuhkan

terkait dengan penyusunan landasan Konseptual perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo.

c. Deskriptif :

Penguraian data dan informasi yang dapat berkaitan dengan perumusan masalah.

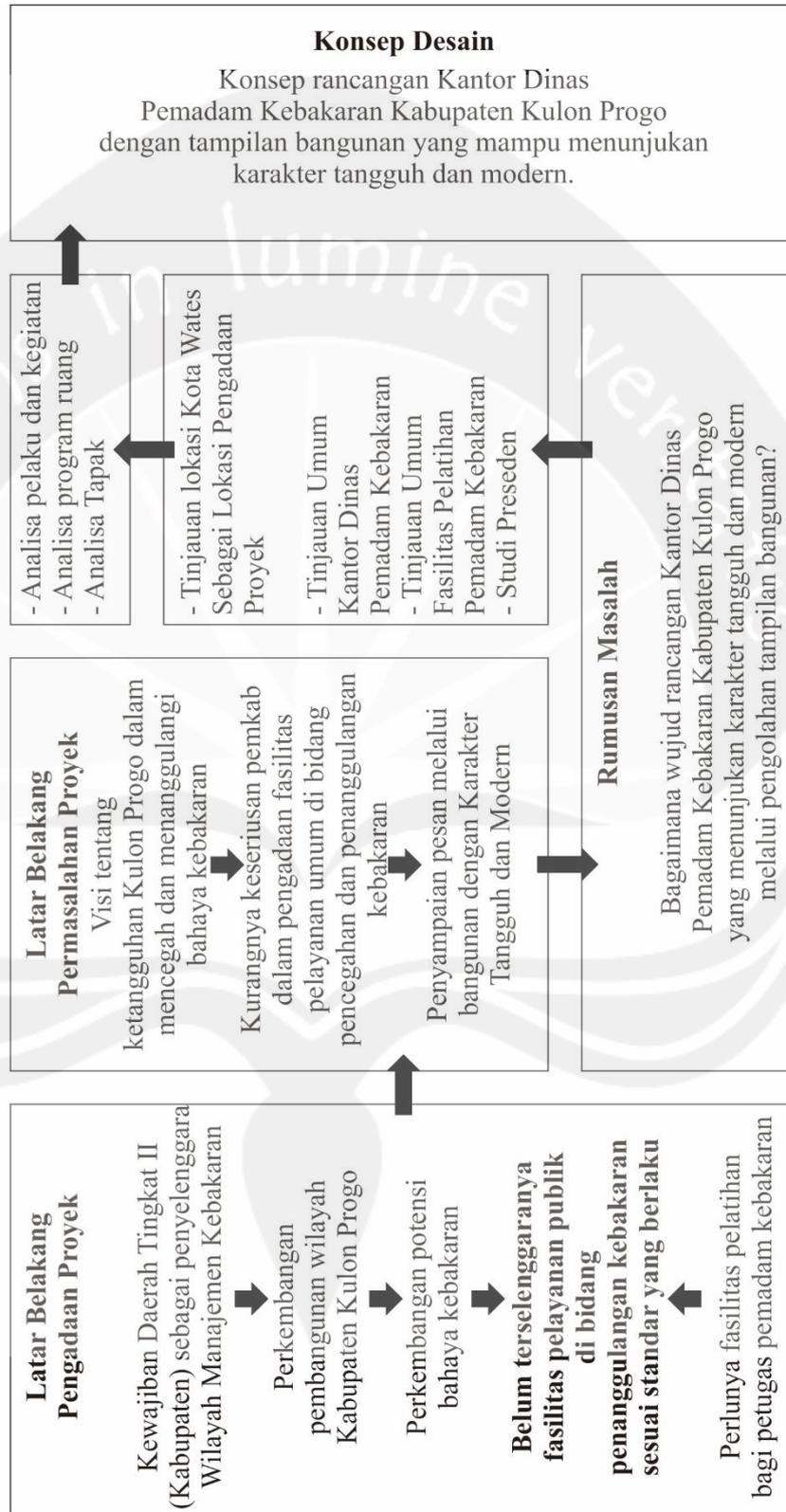
d. Analisis :

Menginterpretasikan data dan informasi yang telah diuraikan untuk mewujudkan landasan Konseptual perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang fungsional dan responsif sesuai dengan fungsi pelayanan publik dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

e. Penarikan Kesimpulan :

Untuk menarik kesimpulan dirumuskan melalui penerapan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah kedalam elemen arsitektural yang kemudian berujung pada konsep perancangan dan aplikasinya dalam desain yang ditunjukkan melalui produk desain.

1.6 Kerangka Pola Pikir



1.7 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pengadaan proyek, latar belakang penekanan studi, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup studi, metode studi, tata langkah, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM PEMADAM KEBAKARAN

Bab ini berisi tentang standar perencanaan dan perancangan kantor dinas pemadam kebakaran pemadam kebakaran.

BAB III. TINJAUAN LOKASI : KOTA WATES SEBAGAI LOKASI PENGADAAN PROYEK

Bab ini berisi tentang data mengenai kriteria pemilihan lokasi, batas lokasi, kondisi geografis, serta peraturan pada wilayah terkait yang nantinya mempengaruhi bentuk Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo.

BAB IV. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIKAL

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang ruang luar dan ruang dalam. Selain itu juga terdapat penjelasan-penjelasan dan landasan yang digunakan untuk penyelesaian konsep perancangan.

BAB V. ANALISIS

Bab ini berisi tentang analisis pendekatan permasalahan mengenai pengolahan tatanan dan kualitas ruang baik itu tata ruang dalam maupun tata ruang luar, analisis program ruang, analisis tapak, hingga analisis desain bangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo.

BAB VI. KONSEP

Bab ini berisi tentang penjelasan konsep perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kulon Progo, pada penataan ruang dalam maupun ruang luar.